

ABSTRAK

Masalah tumpang tindih kepemilikan lahan menjadi masalah yang ditemukan di berbagai bagian Indonesia. Pada umumnya masalah baru muncul dan diketahui terjadi penerbitan sertifikat ganda, yaitu untuk sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu sertifikat yang letak tanahnya saling tumpang tindih, ketika pemegang sertifikat yang bersangkutan akan melakukan suatu perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut. Peneliti akan mengangkat tentang perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat pertama kasus sertifikat ganda yang telah diputus oleh Putusan MA 189K/Pdt/2011.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis*. Sumber data yaitu data sekunder. Data yang diperoleh dengan pengkajian pustaka. Teknis analisis data yang digunakan kualitatif normatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa sertifikat ganda dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 189K/Pdt/2011 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat pertama kasus sertifikat ganda yang telah diputus oleh Putusan MA 189k/Pdt/2011 adalah sudah tepat, karena sesuai dengan kaidah hukum yang tertuang dalam berbagai putusan Mahkamah Agung.

Dapat disimpulkan bahwa, pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa sertifikat ganda dalam putusan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat pertama sudah tepat.

Saran kepada hakim yang memutus perkara lebih cermat melihat fakta dan menerapkan hukum. Jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum maka hakim harus memilih keadilan hukum. Serta kepada pejabat Kantor Pertanahan untuk lebih teliti cermat, seksama, dan melengkapi peta-peta pendaftaran tanah di wilayah yang belum tersedia peta tersebut agar tidak terjadi lagi sengketa tanah mengenai sertifikat ganda.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sertifikat Pertama, Sertifikat Ganda

ABSTRACT

The issue of overlapping land ownership is a problem found in various parts of Indonesia. In general, new problems arise and it is known that the issuance of multiple certificates is that more than one certificate is issued for a plot of land where the land overlaps, when the certificate holder in question will commit a legal action on the parcel of land. Researchers will raise the legal protection of the first certificate holder in the case of a double certificate which has been decided by the Supreme Court Decision 189k / Pdt / 2011.

This study uses a normative juridical approach. The research specification used is descriptive analytical. The data source is secondary data. Data obtained by literature review. The data analysis technique used was normative qualitative.

Based on the results of the research, the judges' consideration in deciding a double certificate dispute in the Supreme Court Decision Number 189K / Pdt / 2011 is in accordance with the applicable legal provisions, namely in accordance with the permanent jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 638 K / Sip / 1969, dated 22 July 1970. , which states that the decisions of the District Court and the High Court which are insufficiently considered (*onvoldoende gemotiveerd*) must be canceled. The legal protection for the first certificate holder in the double certificate case that has been decided by the Supreme Court Decision 189k / Pdt / 2011 is appropriate, because it is in accordance with legal principles set out in various decisions of the Supreme Court.

It can be concluded that, the judge's consideration in deciding a double certificate dispute in the decision is in accordance with the applicable legal provisions and the legal protection of the first certificate holder is appropriate.

Advice to judges who decide cases to be more careful in looking at the facts and applying the law. If there is a conflict between legal certainty and legal justice, the judge must choose legal justice. As well as to Land Office officials to be more careful, thorough, and complete the land registration maps in areas where these maps are not yet available so that land disputes over double certificates do not occur again.

Keywords: Legal Protection, First Certificate, Double Certificate